BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Baswir (1995) dalam Ihyaul Ulum (2009:129) pengawasan adalah :

"……..suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi."

Pengertian pengawasan menurut Askam Tuasikal (2008) pada jurnalnya, adalah sebagai berikut:

"Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah diterapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal."

Sedangkan Pengawasan menurut Wawan & Lia (2009) pada jurnalnya, adalah sebagai berikut:

"Hakikat Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewenangan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi."

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan untuk mengawasi kegiatan yang telah direncanakan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.1.1.1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern menurut Nawawi (2002), adalah sebagai berikut:

"Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuaan kerja masing-masing."

Sawyer et.al (2003:58) dalam Tuasikal, Askam (2008), menegaskan pengendalian internal merupakan:

"suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisien operasi, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku."

Pengawasan intern menurut PP No.60 Th 2008 adalah:

"Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik."

Pengawasan intern di lingkungan sektor publik mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintahan dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor private. Karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaan dalam melaksanakan anggaran. Menurut SE/14/.M.PAN/10/2006 dalam sektor publik pengawasan yang dilakukan

langsung oleh atasan terhadap bawahan memiliki 8 (delapan) unsur untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi : pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan riview intern. Unsur-unsur ini adalah serangkaian kegiatan yang secara bersama-sama dilaksanakan dalam mencapai tujuan pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan terhadap bawahannya.

Sedangkan menurut COSO (*Communication Of Sponsoring Organization*) dalam Santoyo Gondodiyoto (2009:153),

> "*Internal Control* adalah suatu proses, melibatkan *board of director*, manajemen, komite audit, internal audit, dan seluruh anggora organisasi, dan memiliki tiga tujuan utama, yaitu: efektivitas dan efesiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhi hukum dan peraturan yang ada."

Menurut model COSO, Artinya, dengan adanya sistem pengendalian internal, maka diharapkan perusahaan dapat bekerja atau beroperasi secara efektif dan efisien, penyajian informasi dapat diyakini kebenarannya dan semua pihak akan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang baik peraturan dan kebijakan perusahaan ataupun aturan (legal/hukum) pemerintah. Dengan dipatuhinya peraturan dan kebijakan maka penyimpangan dapat dihindari.

COSO merumuskan *internal control* adalah "proses", yang mendorong seluruh persoil untuk tercapainya tujuan organisai, yaitu: efektif, efisien operasi, *reability* laporan keuangan, dan kepatuhan pada hukum/regulasi. (meskipun definisi *internal control* adalah "*process*", tetapi sesungguhnya evaluasi efektivitas *internal control* dilakukan *as of a point in time*).

Model COSO merumuskan tujuan-tujuan *internal controls* dalam kategori bidang kegiatan:

a. *operasional,*
b. *financial reporting,* dan
c. *compliance*. Model (*framework*)

2.1.1.2. Komponen Pengawasan Intern

COSO terdiri lima komponen (unsur-unsur) yang saling berhubungan yang akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan yaitu:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

   Komponen yang berperan dalam membangun atmosfer (iklim) yang kondusif bagi para karyawan mengenai kesadaran pentingnya kontrol sehingga dapat menciptakan suasana yang dapat membuat karyawan dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas kontrol dan tanggungjawabnya masing-masing. *Control environment* merupakan hal dasar (fondasi) bagi komponen COSO yang lain. Lingkungan pengendalian meliputi faktor-faktor seperti *intergrity* dan *ethical values of management*, kompetensi personil, *management philosophy and aoperating style*, bagaimana delegasi tanggung jawab (*responsilibity*) dan wewenang (*authority*) dijalankan, serta pimpinan sebagai panutan. Manajemen harus paham pentingnya pengendalian intern, memberi contoh, dan memberikan dukungan, serta menyampaikan kepada seluruh karyawan *sub-component control environment* terdiri dari:

a) Filosopi & gaya manajemen (*management philosophy and operating style*)
b) Integritas dan nilai etika manajemen (*integrity and ethical values*)
c) Komitmen pada kompetensi personel (*commitment to competence*)
d) Peran direksi, dewan komisaris dan/atau komite audit (*the board of directors or audit commite*)
e) Struktur organisasi (*organizational structure*)
f) Pelaksanaan wewenang & tanggungjawab (*assignment of authority and responsibility*). Authority (otoritas) adalah wewenang pihak tertentu untuk memberi instruksi (right to command) ke bawahan. Sedang *responsibility* (tanggung jawab) adalah kewajiban orang yang ditugaskan untuk secara akuntable melaporkan hasilnya. Pada keadaan lingkungan tertentu dapat dilihat cara manajemen mengorganisasikan dan mengembangkan personilnya.
g) Pedoman yang dibuat manajemen bagi personel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (*human resourse policies and practices*).

2. *Risk Assessment* (Penaksiran Resiko)

   Pengertian "*risk assessment*" pada COSO adalah resiko tidak tercapainya *financial reporting objectives, compliance*, dan *operasional objective*. Proses ini merupakan identifikasi dan analisis resiko yang dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut ditangani. COSO

mengarahkan kita melakukan identifikasi terhadap resiko internal maupun eksternal dari aktivitas suatu *entity* atau individu. Pada tahap *risk assessment* terdapat *cost-benefit consideration* yang memperhitungkan *cost dan benefit* yang akan dihasilkan dari sesuatu penerapan *control*. Artinya, jika biaya untuk pengendalian intern terlalu besar, maka sistem pengendalian intern tersebut seudah tidak punya makna positif lagi. Resiko bersifat *dinamic*, artinya mengalami perunahan, dan COSO mendorong manajemen terus-menerut melakukan analisis serta memuhtakhirkan *internal control system.*

3. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)

   Merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen dan bahwa resiko sudah diantisipasi. COSO menekankan perlunya integarsi *control activities* dengan *risk assessment. Control activities* juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untk penanganan resiko telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, misalnya :*financial performance review*, rekonsiliasi, *system control, physical control*, pemisahan tugas, verifikasi.

   Aktivitas pengendalian menurut COSO terdiri dari tiga kelompok tujuan:

   a) Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong akurasi *financial reporting:*

      - Pemisahan tugas dan fungsi
      - Otorisasi yang memadai

- Dokumentasi yang layak
- Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan akuntansi
- Verifikasi independen atau review atas kegiatan/kineja

b) Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong kinerja

- *Performance review*

c) Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong kehandalan *information processing:*

- *General control*
- *Application control*

4. *Information & Communication* (Informasi dan Komunikasi)

Komponen ini menjelaskan bahwa sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan dan peningkatan mutu operasional organisasi. Informasi, baik yang diperoleh dari eksternal maupun pengolahan internal merupakan potensi strategis (*potential strategic*). Sistem informasi hendaknya terintegrasi/terpadu (*integrated system*), dan menjamin kebutuhan terhadap kualitas data. Sistem Informasi harus dapat memberikan data yang memiliki karakteristik:

- *Relative to established objective* (berhubungan dengan sasaran)
- *Accurate and in sufficient detail* (akuran dan terinci)
- *Understandable and in a usable form* (mudah dipahami / digunakan)

Komunikasi membahas mengenai perlunya penyampaian semua hal-hal yang berhubungan kebijakan pimpinan kepada seluruh anggota organisasi.

Semua pegawai harus paham tentang kondisi perusahaan, kebijakan pimpinan, tentang *internal control*, *competitive*, dan keadaan ekonomi.

Kebijakan manajemen harus diinformasikan, harus disampaikan dengan jelas, dibuat *policy manual*, tata administrasi (penggunaan surat menyurat, memo, perintah kerja), *standard* pelaporan, adanya resiko yang mungkin timbul karena adanya bidang baru, perubahan sistem, atau teknologi baru, perkembangan pesat organisasi/entitas, aspek-aspek hujum yang harus diperhatikan, sebagainya. Segala sesuatu harus dikomunikasikan kepada pihak dan seluruh personil.

Contoh *communication* : kewajban dan tanggung jawab karyawan terhadap pengendalian harus dikomunikasikan dengan jelas, tertulis.

5. *Monitoring* (Pemantauan)

   Aspek "*monitoring*" COSO mengedepankan kebutuhan manajemen untuk monitor sistem pengendalian intern melalui *internal control system* itu sendiri. Komponen atau pengawasan dijelaskan dalam COSO untuk memastikan kehandalan sistem dan *internal control* dari waktu ke waktu. Monitoring merupakan proses yang menilai kualitas dan kinerja sistem dan *internanl control* dari waktu ke waktu, yang dilakukan dengan melakukan aktivitas monitoring dan melakukan evaluasi terpisah. Pada hakekatnya terdapat dua mekanisme pemantauan, yaitu: (a) yang bersifat *on-going monitoring activities*, yaitu pengawasan yang langsung dilakukan oleh masing-masing atasan pihak yang bersangkutan berdasarkan jenjang hierarki jabatan, dan (b) *a separate monitoring*

activities, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh fungsi audit. Pada masa orde baru kedua jenis pengawasan itu sering disebut dengan istilah pengawasan melekat (oleh atasan) dan pengawasan fungsional.

Contoh aktivitas monitoring:

- Manajemen me-review pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan pada unit yang dipimpinnya.
- Dilakukan pada suatu unit oleh fungsi audit.

Sedangkan unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah di praktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi :

a. Lingkungan pengendalian

   Pimpinan Instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat

b. Penilaian resiko

   Pengendalaian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar meupun dari dalam

c. Kegiatan pengendalian

   Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkingkan pemimpin Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.1.2. Pemeriksaan (Audit)

Menurut Mulyadi & Puradiredja (1998) dalam Ilyaul Ulum (2009:3) menyatakan bahwa pemeriksaan (audit) adalah:

"……suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan."

Sedangkan menurut Indra Bastian (2007:42) auditing adalah:

"Suatu proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (*assertion*) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan."

Maka dapat penulis simpulkan bahwa pemeriksaan (auditing) merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten untuk dapat mengakumulasi dan menilai bukti-bukti tentang kegiatan ekonomi tertentu dengan tujuan pelaporan tingkat perbedaan antara informasi dengan kriteria-kriterianya.

2.1.2.1. Audit Internal

Menurut Lawrence B Sawyer (2005:10) dalam "Internal Auditing – Audit Internal Sawyer" definisi audit internal sebagai berikut :

"Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrrol yang berbeda – beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif."

Pengertian audit internal, *the institute of internal auditors* (Akmal, 2006, h3) dalam (Gondodiyoto: 2009:12) memberikan definisi sebagai berikut :

"Internal auditing is an independent appraisal function, estabilished within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization in the effective discharge of their responsibilities. To this end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, recommendations, cousel, and information concering the activities reviewed. The audit objective includes promoting effective control a reasonable cost"

Pada tahun 1999 *Board of Directors* The IIA merubah batasan pengertian tentang *audit intern* tersebut (Pickett,2005,p.l) dalam (Gondodiyoto: 2009:12) menjadi agak berbeda, yaitu:

"*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accoplish its objectives by bringing a systematic, disiplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process".*

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Audit intern melakukan tugas-tugas antara lain mendesain/mereview/meng-evaluasi sistem pengendalian intern (termasuk kinerja) apakah sudah efektif, efisien, dan ekonomis (3E), melakukan audit (keuangan/operasional/ketaatan/investigatif), serta melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Pemimpin. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada pucuk pimpinan dan bekerja-sama dengan komite audit. Menurut The IIA, Audit Internal mempunyai peranan besar dalam mendukung kewajiban direksi (*top management*), antara lain:

- *Monitor activities which are cannot itself monitor by top management*.

  Mewakili (bekerja untuk direksi) dalam mengawasi atau monitor pekerjaan yang memeang tidak mungkin diawasi sendiri oleh pucuk pimpinan.

- *Identifying and minimizing risks.*

  Mengidentifikasi dan meminimalisir resiko yang dihadapi.

- *Validating reports to top management.*

  Melakukan pengecekan atas validitas laporan-laporan untuk direksi.

- *Protect senior management in technical aspects.*

  Menjaga agar pimpinan berbuat kesalahan yang berkaitan dengan hal teknis.

- *Validate provided information for decision making.*

  Melakukan pengecekan kebenaran data yang akan dipakai sebagai bahan untuk pengambilan putusan oleh pimpinan puncak.

- *Review performance (future and the past).*

  Mereview/menilai kerja perusahaan , apakah segala sesuatu yang terkait dengan operasi perusahaan telah berjalan seperti yang diharapkan oleh pimpinan.

- *Helping line managers manage by pointing to violation of procedures/management principles.*

  Membantu para manajer fungsional jangan sampai melakukan kesalahan teknis, kesalahan prosedur atau penyimpangan dari prinsip manajemen yang baik sehingga dapat merugikan perusahaan.

2.1.2.2. Fungsi Audit Internal

Pengertian fungsi audit internal menurut Mulyadi (2002:202):

"……adalah menyediakan jasa yaitu menyediakan jasa analisis dan eveluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi kepada menejemen dan dewan komisaris serta pihak yang lain, yang setara dengan wewenang dan tanggungjawabnya."

Sedangkan dalam jurnal Abdul Rohman (2007**)** fungsi pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.

Menurut Gondodiyoto (2009:15) pada hakekatnya fungsi audit intern ialah sebagai unit yang bertanggung jawab dan mengerjakan tugas-tugas atas nama dan hanya untuk (*on behalf of*) direksi (*top management*).

Tugas-tugas untuk membantu menejemen tersebut ialah antara lain:

- Mengidentifikasi resiko dan merancang antisipasinya serta memonitornya.
- Memvalidasi (memeriksa kebenaran) laporan-laporan yang ditujukan ke direksi, jangan sampai direksi memperoleh laporan-laporan kegiatan organisasi dari para pemimpin departemen yang tidak sesuai kenyataannya.
- Membantu atau "melindungi" manajemen puncak dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal teknis, sehingga manajemen dapat lebih berkonsentrasi mengerjakan tugas-tugas yang lebih bersifat kebijakan, mengambil keputusan (*decision making*), perencanaan (*planning*), *lobbying* (bersosialisasi) dengan para *stakeholder*, dan sebagainya.
- Membantu manajemen (termasuk para manajer fungsional) tentang hal-hal yang bersifat rawan kesalahan/penyalahgunaan, penyimpangan dari aturan dan prinsip-prinsip manajemen
- Melakukan tugas-tugas manajemen yang tidak dapat dilaksanakan sendiri (*top management cannot itself monitor*).

Karena pentingnya peranan fungsi audit intern, maka perusahaan membentuk unit yang menjalankan fungsi audit intern tersebut (di Indonesia disebut Satuan Pengawasan Intern dengan pimpinan setingkat *General Manajer*).

Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukan bahwa aktivitas audit internal harus ditetapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan – catatan akuntansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melaksanakan kegiatan – kegiatan berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya umum yang minimum.
2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan – kegiatan perusahaan.

Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur – unsur pengendalian intern lainnya.

Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga harus melakukan suatu penilaian dari berbagai fungsi operasional.

Peranan audit intern berkembang dari semula yang hanya sebagai suatu tugas klerikal (pemeriksaan ulang *record/book keeping*), kemudian berperan sebagai pembantu dalam *testing the relialibility of sccounting records* dalam keuangan maupun non-keuangan, jasa peningkatan mutu sistem informasi maupun operasional suatu profesi dengan tugas utama *evaluating the organization's risk management.* Profesi audit intern kini bahkan dapat menjadi salah satu training ground para pegawai yang nantinya diproyeksikan bisa menjadi calon – calon pimpinan unit.

2.1.2.3. Lingkup Pemeriksaan Audit Internal

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal atau audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta keefektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan.

Lingkup pemeriksaan internal, sebagaimana ditetepakan dalam standar, meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Walau demikian, dimungkinkan pula diberi pedoman umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan diperiksa.

Lingkup pelaksanaan pemeriksaan internal audit menurut Hiro Tugiman (2006 : 18) yaitu terdiri atas:

1. Perencanaan pemeriksaan
2. Pengujian dan Pengevaluasian informasi
3. Penyampaian hasil pemeriksaan
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai hal – hal yang terdapat di dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan audit internal :

1. Perencanaan pemeriksaan.

Pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan meliputi hal – hal berikut ini :

a. Penetapan tujuan dan lingkup pekerjaan.

1) Tujuan pemeriksaan adalah pernyataan paling luas yang dihasilkan oleh pemeriksa internal dan menyebutkan berbagai hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan. Berbagai tujuan dan prosedur pemeriksaan secara bersama – samaakan menyatakan lingkup pekerjaan pemeriksaan internal.
2) Tujuan dan prosedur pemeriksaan haruslah ditujukan pada berbagai risiko yang berhubungan dengan kegiatan yang akan diperiksa. istilah risiko merupakan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kegiatan yang akan diperiksa.
3) Tujuan pemeriksaan risiko yang dilakukan pada persiapan adalah untuk mentukan area yang penting dalam kegiatan yang akan diperiksa.

b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.

1) Peninjauan atas review terhadap informasi dasar haruslah dilakukan untuk menentukan dampaknya terhadap pemeriksaan. Hal – hal tersebut mencakup hal – hal berikut.

a) Pernyataan tentang tugas.

b) Informasi Organisasi

c) Informasi Anggaran

d) Kertas kerja pemeriksaan yang sebelumnya

e) Hasil – hasil dari pemeriksaan sebelumnya

f) Hasil – hasil dari pemeriksa lainnya

g) File – file pembanding

h) Literatur – literatur teknis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang

2) Berbagai keperluan pelaksanaan pemeriksa lainnya, seperti jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, luas periode yang akan diperiksa, dan perkiraan saat selesainya pemeriksaan haruslah ditentukan. Harus pula dipertimbangkan bentuk laporan pemeriksaan final karena perencanaan yang tepat pada tahap ini akan memudahkan penulisan laporan pemeriksaan yang final.

3) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.

a) Jumlah dan tingkat pengalaman staf pemeriksa yang diperlukan haruslah didasarkan pada evaluasi sifat dan tingkat kesulitan dari

tugas pemeriksaan , batas waktu penyelesaian, dan tenaga yang tersedia.

b) Pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu dari staf pemeriksa haruslah dipertimbangkan dalam pemilihan pemeriksa yang akan ditugaskan.

c) Latihan yang dibutuhkan olah para pemeriksa harus pula dipertimbangkan karena tiap – tiap tugas pemeriksaan akan berfungsi sebagai dasar tercapainya perkembangan yang dibutuhkan olah bagian audit internal.

d) Pertimbangan penggunaan tenaga eksternal apabila terdapat kebutuhan akan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu tambahan.

4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dianggap perlu.

a) Haruslah dilakukan rapat dengan manajemen yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang akan diperiksa

b) Rangkuman hal – hal yang didiskusikan pada rapat dan berbagai kesimpulan yang dihasilkan haruslah dibuat, didistribusikan kepada individu – individu yang memerlukan , dan disimpan dalam kertas kerja pemeriksaan.

5) Melaksanakan survei secara tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko – resiko dan pengawasan – pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.

a) Survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara terperinci, tentang kegiatan yang akan diperiksa.
b) Survei menghasilkan berbagai keterangan yang akan dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan, serta merupakan suatu alat yang efektif bagi penentuan penggunaan sumber daya bagian pemeriksaan internal secara efektif
c) fokus suatu survei bermacam – macam, tergantung pada sifat atau keadaan pemeriksaan.
d) Lingkup pekerjaan dan waktu yang diperlukan bagi pelaksanaan survei bermacam – macam.
e) Survei meliputi penggunaan prosedur – prosedur diskusi dengan pihak yang akan diperiksa, wawancara dengan individu yang terpengaruh dengan kegiatan yang akan diperiksa, observasi lapangan, peninjauan atau review terhadap laporan dan penelitian yang dilakukan oleh manajemen, prosedur pemeriksaan analisis, pembuatan bagan atau arus flowchart, melakukan pengujian terhadap pelaksanaan pekerjaan tertentu, dan mendokumentasikan aktivitas kunci pengendalian.
f) Pada akhir survei harus dibuat suatu risalah tentang hasil survei, yang isinya harus mengidentifikasi persoalan pemeriksaan,.
g) Penulisan program pemeriksaan
h) Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil – hasil pemeriksaan akan disampaikan. Pimpinan audit internal

bertanggungjawab menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan. hasil pemeriksaan tersebut haruslah didokumentasikan, dapat dibuktikan, dan diberitahukan kepada manajemen.

i) Memperoleh persetujuan bagai rencana kerja pemeriksaan. Pada rencana kerja pemeriksaan haruslah disetujui secara tertulis oleh pimpinan audit internal dan harus disetujui dalam waktu yang tepat.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi.

Pemeriksa internal harus mengumpulkan , menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.

1) Pemeriksa internal mempergunakan berbagai prosedur pemeriksaan analitis pada saat menguji dan mengevaluasi informasi.
2) Prosedur pemeriksaan analitis dilakukan dengan cara meneliti dan memperbandingan berbagai hubungan antara informasi finansial dan non finansial.
3) Prosedur pemeriksaan analitis memberikan cara efisien dan efektif bagi audit internal dalam menilai berbagai informasi yang dikumpulkan selama pemeriksaan.
4) Prosedur pemeriksaan sangat berguna dalam mengidentifikasikan hal perbedaan, kesalahan, ketidakteraturan.

5) Prosedur pemeriksaan analitis dapat dilakukan dengan melakukan jumlah moneter, kuantitas fisik dan persentase.

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekemondasi.

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan.

d. Proses pengumpulan analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan internal harus melaporkan hasil – hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. Yang meliputi :

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selasai dilakukan.

b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan namajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir.

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan.

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Audit internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan – temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan lanjut yang tepat.

a. Tindak lanjut didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan waktu.
b. Sifat, ketepatan waktu dan luas tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan audit internal.

2.1.3. Kinerja

Menurut Rivai, Basri (2005:14) dalam Lijan Poltak Sinambela (2012:6) kinerja adalah :

"……...hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama."

Stout (1993) dalam BPKP (2000) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau pun suatu proses.

2.1.3.1. Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja Ihyaul ulum (2009:21) antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untu kmemperbaiki kinerja.
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
h. Memastikan bahwa pengambilam keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.3.2. Kinerja Sektor Publik

Menurut Lijan Poltak Sinambela (2012:184) kinerja sektor publik adalah:

"Kinerja birokrat atau pemerintah ataupun pengelola BUMN/BUMD (yang mewakili negara) dalam menyediakan berbagai kepentingan masyarakat (barang dan jasa) serta menyelenggarakan pelayanan kepada umum atau masyarakat. Semakin baik pelayanan pemerintah kepada masyarakat, akan membawa kesejahteraan yang semakin meningkat."

2.1.3.3. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo (2011:121) dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, antara lain:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Mohamad Mahsun (2006:26) terdapat empat elemen pengukuran kinerja organisasi yaitu:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja (umpan balik, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

2.1.3.4. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2007) dalam jurnalnya, kinerja pemerintah daerah:

> "……..merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu."

Sedangkan menurut Wawan dan Lia (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan-urusannya tersebut.

2.1.3.5. Siklus Penilaian Organsisasi Sektor Publik

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dalam Lijan Poltak Sinambela (2012:201) siklus pengukuran kinerja dalam lima tahap, yaitu:

- Perencanaan Strategik

  Siklus penilaian kinerja diawali dengan proses penetapan rencana strategik yang berkenan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan

- Penetapan indikator kinerja

  Setelah perumusan rencana strategik, instansi pemerintah perlu menyusun dan menetapkan indikator kinerja berupa: *input, process, output, outcome, benefit* dan *impact*. Untuk beberapa program atau

aktivitas, tahapan ini mungkin mudah dan simpel untuk didefinisikan dibandingkan dengan tahapan yang lainnya.

- Pengembangan sistem penilaian kinerja

  Selanjutnya tahap berikutnya dalah perancangan sistem penilaian kinerja. Dalam tahap iniharus diyakini bahwa organisasi memiliki data yang cukup untk keperluan penilaian kinerja. Dengan sistem penilaian yang sudah baku tersebut dapat digunakan untuk pengumpulan data dan informasi untuk digunakan menganalisi kinerja organisasi.

- Penyempurnaan ukuran

  Apabila ditemukan berbagai indikator kinerja dalam pengukuran kinerja ini, bahwa indikator atau ukuran kinerja tidak sesuai sehingga diperlukan modifikasi dan penyempurnaan. Dalam penyempurnaan ukuan ini perlu diperhatikan: (a) para pemangku kepentingan, (b)permintaan atau keinginan pemangku kepentingan, (c)barang dan jasa, (d)konsumen atau pengguna jasa, (e)keinginan konsumen, (f)proses kegiatan, (g)ukuran, (h)masukan, (i)pemasok, dan (jj)persyaratan pemasok.

- Pengintegrasian dengan proses manajemen

  Sistem penilaian yang sudah tersedia belumlah akan menghasilkan data dan informasiyang efektif. Efektif tidaknya penilain yang dilakukan akan dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan dan penggunaan data dan informasi yang diperoleh. Untuk itu perencanaan dan penilain kinerja haruslah terintegrasi dalam kegiatan program.

2.1.4. Hasil Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini, peneliti mengambil referensi dengan menggunakan media Jurnal Ilmiah berjumlah 8 jurnal sebagai acuan. Jurnal penelitian terdahulu dan kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Sumber, Tahun, Asal Universitas	Judul Jurnal	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
Wawan Sukmana & Lia Anggarsari. 2009. Universitas Siliwangi ISSN:1907-9958	PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (SURVEI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA)	Secara parsial Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan bahwa Pengawasan Intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntanbilitas Pemerintah. Semakin baik Pengawasan Intern yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.	(1) Indikator dalam tiap variabel independen Pengawasan Intern, menggunakan indikator COSO, sedangkan pada Jurnal ini tidak ada. (2) Variabel Independen Sistem Akuntansi Kuangan Daerah	Variabel Independen , yakni ***Pengawasan Intern***,
Abdul Rohman, 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro	PENGARUH PERANAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN FUNGSI PEMERIKSAAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH	*Pertama.*Hipotesis penelitian peran manajerial PPKD berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukti, hal ini ditunjukan dari nilai koefisien jalur sebesar 0,329 > o. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh dan peran manajerial PPKD	Terdapat pada variabel independen peranan manajerial pengelola keuangan daerah, dan variabel independen fungsi	Persamaan terdapat pada variable independen Fungsi Pemeriksaan Intern dan variavel

ISSN : 1412-6680	DAERAH (Survei Pada Pemda, Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah)	terhadap kinerja Pemda. *Kedua,* Hipotesis penelitian fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda terbukti, hal ini ditunjukan dari nilai koefisien jalur sebesar 0,255 ?0. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemda.	pemeriksaan intern	dependen ***Kinerja Pemerintah Daerah***
Askam Tuasikal,(2008) *Finance and Banking journal* Uvinersitas Pattimura Ambon ISSN 1410-8623	Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah	Secara parsial pengawasan internal dan ekternal serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Namun secara simultan pengawasaninternal dan ekternal dan pemahaman mengenai sistem akuntansi, serta pengelolaan keuangan berpengaruh relatih rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah..	Terdapat perbedaan variabel yakni, pemeiksaan intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan pengelolaan keuangan.	Terdapat persamaan pada variabel pengawasan intern dan kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.
Abdul Rohman. 2009. Universitas Sebelas Maret (Universitas Diponegoro)	PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (SURVEI PADA PEMDA DI JAWA TENGAH)	*Pertama,*Implementasi sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap fungsi pelaksanaan intern. *Kedua,*Implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. *Ketiga,* Implementasi sistem akuntansi pemerintahan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah terbukti, hal ini menunjukan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan	Terdapat perbedaan pada variabel sistem akuntansi, pengelolaan daerah	Terdapat persamaan pada variavel **Fungsi *Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah***

		memberikan kemanfaatan dan kemudahan bagi Pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Keempat,* Implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda, yang mana implementasi sistem pengelolaan keuangan telah mendorong peningkatan kinerja Pemda, sebab proses pengelolaan keuangan menekankan pada hubungan antara dana yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang ingin di capai. *Kelima,* Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Fungsi pemeriksaan intern membantu para pegawai Pemda dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan melakukan analisi, dan penilaian atas operasional Pemda serta mengajukan saran-saran perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan. Fungsi ini bertanggung jawab memonitor kinerja pengendalian Pemda yang berorientasi pada pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan masa lalu; dan penilaian atas semua program kegitan operasional. Dengan demikian fingsi pemeriksaan intern membantu Pemda dalam mencapai kinerjanya yang lebih baik		

Arja Sadjiarto, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol 2 ISSN: 1411-0288	Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja pemerintahan	*Akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaankeuangan negara. Sedangkan dalam kenyataan sehari-hari keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhihanya oleh informasi keuangan saja. Kinerja departemenatau dinas tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti ROI, jumlah sumber data yang digunakan atau rasio pendapatan di bandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada "net profit"*	Perbedaan pada variabel akuntabilitas	Terdapat persamaan pada variabel pengukuran kinerja pemerintah.
Dedi Kusmayadi, 2009, Jurnal Ichsan Gorontalo ISSN: 1907-5324	PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* (SURVEI PADA PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA)	Hasil analisis menunjukan bahwa pengaruh secara sebesar 0,192 yang berarti bahwa pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap *good government governance* sebesar 0,192 atau 19,2%.	Terdapat pada variabel independen, penatausahaan keuangan daearah	Terdapat persamaan terhadap variabel Independen1 yakni ***Pengawasaan Intern***
Hamdan Ahmed kaid Al-Saidi ; Dr.Shivaji	*Internal Control In the Government Unit In Yemen*	The government body is responsible for establishing ang maintaining internal control, the government body must educates		Persamaan pada variabel internal control.

(2012) Borhade Srikrishna International reasearch & Educational Consortium ISSN 2229-4104		employees about importance of internal control and provides funding to implement the conrol. The government body must also ensure that internal control remain a top management priority.		
Angus Okechukwu and Mohammed Isa Kida (2011) Journal of Emerging Trends in Economic and management Scienes (JETEMS) ISSN: 2141-7024	Effectivenees of Internal Audit as Instrument of Improving Public Sector management	H2:The null hypothesis states that internal audit cannot effectively because the sugnificance of the result is veri high, which show that p-0.05 meaning that the outcome is significant. H1: as the result showed that p significant, we reject the null hypothesis which states that significant number od Public sector Departement do not have internal audit unit. H3:Both univariate test on reason of continuedpersistent of fraud and fraudulent activities in Kano State Public sector assertions as show in the table 8 and the pair-wise test show that the resul are significant, hence we rejected the null hyphothesis which states that tere are no		Persamaan pada variabel Internal Audit

2.2. Kerangka Pemikiran

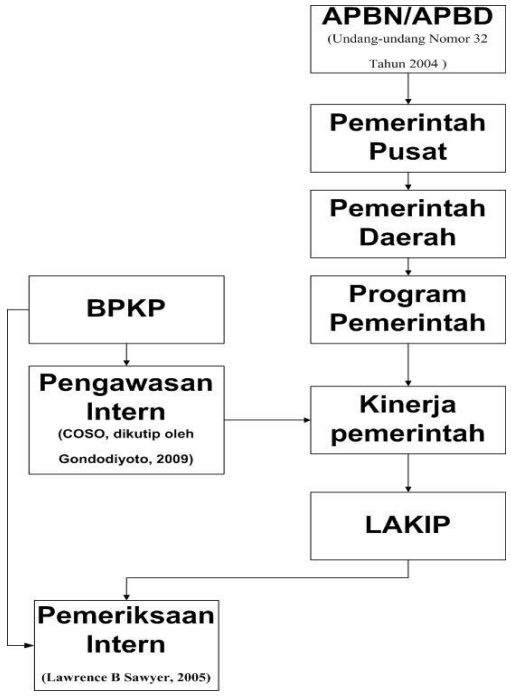
Dengan adanya akuntabilitas publik sudah semestinya pemerintah baik pusat maupun daerah mengkomunikasikan dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik, baik program, kebijakan, dan segala perangkat yang menyangkut mengenai publik karena semua pembiayaan berasal dari publik dan harus dipertanggung jawabkan kepada publik juga.

Sejalan dengan itu, berawal dari APBN dan APBD yang merupakan anggaran bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjalankan setiap program yang dijalankan pemerintah tentunya diperlukan pengawasan, baik pengawasan ekternal maupun pengawasan internal yang bertujuan untuk melihat sejauhmana ketercapaian program dan sesuaikan kondisi yang dicapai dengan kriteria yang diterapkan. Dan dengan diadakannya pengawasan ini pula, kita dapat mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pemerintah apakah terdapat peningkatan atau bahkan terdapat kemunduran dalam kinerja yang mana dapat menyebabkan tidak tercapai secara optimalnya suatu program. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan APBD kabupaten/kota.

Terkait hal tersebut, dalam menjalankan dan membiayai program-program pemerintah, tentunya pemerintah telah menganggarkan pendapatan dan belanja yang tertuang dalam bentuk APBN dan APBD. Dalam mencapai programnya,

tentunya anggaran ini harus dikelola dan dibelanjakan dengan baik guna ketercapaian program, dan segala kegiatan harus dilaporkan dalam bentuk LAKIP atau LKPD sebagai bukti bahwa pelaksanaan kegiatan / program pemerintah itu memang benar terealisasi adanya tanpa ada manipulasi data serta bagaimana pemerintah menjalankan program secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E) karena merupakan salah satu alat pertanggungjawaban pemerintah dan merupakan akuntabilitas kepada masyarakat dan disusun kedalam IHP Oleh sebab itu dari diperlukan adanya pemeriksaan intern, sehingga kita dapat mengetahui apabila terjadi temuan kecurangan Pemerintah dalam menjalankan suatu program dan kita pula dapat mengetahui seberapa besar kinerja pemerintah dalam menjalankan semua tugas-tugasnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

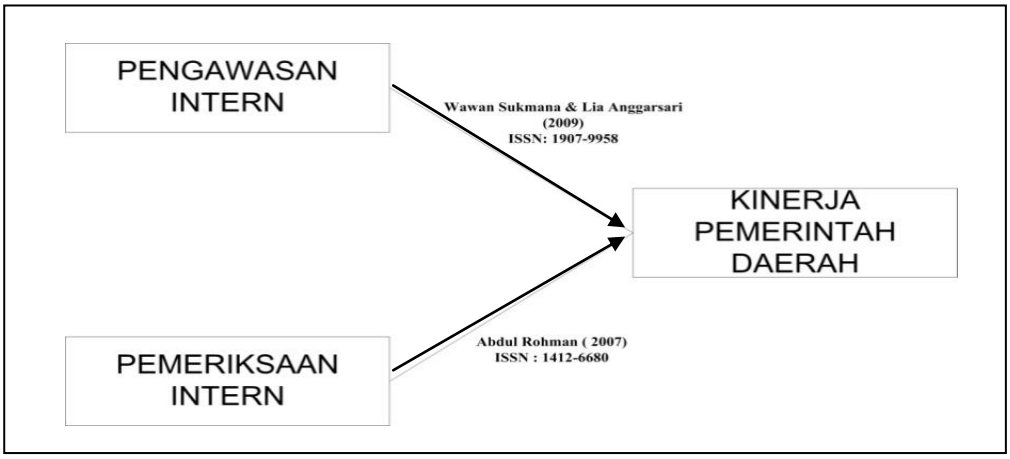
2.2.1.1. Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Wawan dan Lia (2009) dalam jurnalnya mengatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai.

2.2.1.2. Pengaruh Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2007) dalam jurnalnya menunjukan bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Ia mengatakan bahwa pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemda termasuk pengaruh yang relatif kecil, hal ini menunjukan bahwa fungsi pemeriksaan intern pada Pemda di Jawa Tengah memberikan andil yang kecil dalam pencapaian kinerja Pemda. Fungsi pemeriksaan intern membantu para pegawai Pemda dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan analisis, dan penilaian atasoperasional Pemda serta mengajukan saran-saran perbaikan atas penyimpanan yang ditemukan. Fungsi ini bertanggungjawab memonitor kinerja pengendalian Pemda yang berorientasi pada pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan masa yang lalu, dan penilaian atas semua program dan kegiatan pemda. Dengan demikian, fungsi pemeriksaan intern membantu Pemda dalam mencapai kinerjanya yang lebih baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan pengaruh antarvariael tersebut maka penulis dapat memetakan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2
Skema Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul "Metode Penelitian Bisnis" Hipotesis adalah :

> "Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis berasumsi bahwa :

H1:Pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan dengan baik

H2:Fungsi pemeriksaan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan dengan baik.

H3:Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan dengan baik

H4: Pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung).

H5:Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung)

H6:Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung)